

Pengangguran, Inflasi dan Kebijakan Pemerintah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Elsa Susanti

Uin Suska Riau

elsasusanti592@gmail.com

Meri Kartika

Uin Suska Riau

meri.kartika19@gmail.com

Muhammad Albahi

Uin Suska Riau

muhammad.albahi@uin-suska.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the relationship between unemployment, inflation, and government policy from an Islamic economic perspective. Unemployment and inflation are two major economic problems that can affect the social and economic stability of a country. In Islamic economics basically does not recognize the term inflation because the currency used is the dinar and dirham, the value of which is stable. Likewise, unemployment is seen as a failure of the economic system in providing halal and equitable jobs, while inflation is considered a result of unfair monetary policies and economic practices that are detrimental to the community. Government policy, in this context, has an important role to play in overcoming both problems by using Islamic economic principles, such as justice, balance, and the prohibition of usury and speculative practices. This study uses a literature study method, examining how fiscal and monetary policies can be adjusted to Islamic values to create a just and sustainable economy. The results of this study are expected to provide more effective policy recommendations in reducing unemployment and inflation, as well as creating social welfare for the community in accordance with Islamic economic principles. To overcome the problem of unemployment, what needs to be fixed is the human mentality and the improvement of the social system. Through an integral and comprehensive education system supported by adequate facilities, so that it can reach all levels of society, self-awareness must be built about the dignity and worth of humans as perfect creatures of Allah SWT.

Keywords: *Unemployment, Inflation, Government Policy (Trade off)*

PENDAHULUAN

Pengangguran dan inflasi merupakan dua isu ekonomi utama yang saling berkaitan dan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Pengangguran, yang mencerminkan ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan, terus menjadi masalah serius. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia meningkat menjadi 5,86% pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan ketidakmampuan pasar tenaga kerja untuk mengakomodasi pertumbuhan angkatan kerja yang terus bertambah. Beberapa faktor penyebab tingginya tingkat pengangguran di Indonesia antara lain ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja (mismatch), terbatasnya lapangan pekerjaan, serta rendahnya kualitas pendidikan dan pelatihan vokasional yang tersedia (Badan Pusat Statistik, 2023).

Di sisi lain, inflasi juga menjadi tantangan serius yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Pada tahun 2023, tingkat inflasi tahunan di Indonesia tercatat sebesar 4,5%, melampaui target pemerintah sebesar 3,5% (Bank Indonesia, 2023). Inflasi yang tinggi menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, yang pada akhirnya meningkatkan biaya hidup masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Dampak inflasi yang signifikan terlihat pada sektor-sektor penting seperti pangan, transportasi, dan perumahan, yang secara langsung memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Hubungan antara pengangguran dan inflasi sering kali menciptakan dinamika ekonomi yang kompleks. Menurut teori Kurva Phillips, terdapat hubungan terbalik antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek. Teori ini menyatakan bahwa peningkatan inflasi dapat menurunkan tingkat pengangguran karena adanya peningkatan aktivitas ekonomi. Namun, dalam jangka panjang, efek ini tidak selalu bertahan. Inflasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, menghambat investasi, dan memperburuk masalah pengangguran (Phillips, 1958).

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengatasi pengangguran dan inflasi, seperti program peningkatan keterampilan tenaga kerja (upskilling) serta kebijakan moneter yang bertujuan untuk menjaga kestabilan harga. Namun, efektivitas kebijakan-kebijakan ini masih menjadi perdebatan, terutama dengan adanya ketidakpastian global seperti fluktuasi harga komoditas dan dinamika geopolitik (Kementerian Keuangan, 2023). Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai hubungan antara pengangguran dan inflasi, serta evaluasi terhadap efektivitas kebijakan yang telah diterapkan untuk mengatasi kedua isu ini.

KAJIAN PUSTAKA

Inflasi

Adanya masalah ekonomi jangka pendek yang tidak dapat diselesaikan oleh teori ekonomi klasik, seperti inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perkembangan ekonomi makro. Kemerosotan ekonomi Amerika tahun 1929 menandai dimulainya ekonomi makro. Depresi adalah bencana yang melanda perekonomian ketika pengangguran dan inflasi yang berlebihan menyebabkan output terhenti (Naf'an, 2014). Dalam hal kebijakan moneter, pengetahuan mengenai bagaimana pelaku ekonomi menciptakan ekspektasi inflasi dan variabel-variabel yang mempengaruhi inflasi adalah salah satu komponen yang paling penting untuk efektivitasnya (Agus Budi Santoso, 2017).

Secara umum, Kenaikan harga-harga secara keseluruhan dari waktu ke waktu secara terus-menerus disebut sebagai inflasi. Diskusi tentang inflasi selalu menarik, terutama ketika mempertimbangkan dampaknya yang luas pada ekonomi makro secara keseluruhan.

Orang-orang yang merupakan bagian dari angkatan kerja tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan dikatakan sebagai pengangguran. Definisi lain dari pengangguran adalah keadaan di mana mereka yang tidak memiliki pekerjaan masih mencari pekerjaan atau memulai bisnis untuk menghasilkan pendapatan. Pengangguran juga dapat merujuk pada seseorang yang telah menemukan pekerjaan tetapi belum memulainya, atau seseorang yang tidak mencari pekerjaan karena mereka percaya bahwa mereka tidak mungkin mendapatkannya pekerjaan.

Melalui SAKERNAS (Survei Angkatan Kerja Nasional), Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan pengangguran sebagai mereka yang sedang mencari pekerjaan namun tidak memiliki pekerjaan, mereka yang sedang memulai usaha namun tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja (Imamudin Yuliadi, 2019).

Islam mengajarkan umatnya untuk terus berikhtiar dan tidak berpangku tangan. Islam memandang bekerja sebagai salah satu bentuk ibadah untuk memohon rezeki kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jihad di jalan Allah termasuk bekerja untuk mencari nafkah yang halal dan thayiban.

Teori Pengangguran dan Kebijakan Pemerintah dan Pandangan Ekonomi Islam

Pengangguran merupakan salah satu masalah utama dalam ekonomi yang menjadi fokus para ahli dan pemerintah di seluruh dunia. Menurut Mankiw (2019), pengangguran adalah situasi ketika sebagian individu yang berada dalam usia kerja, dan bersedia untuk bekerja dengan upah yang berlaku di pasar, tidak dapat menemukan pekerjaan. Teori ini mencakup berbagai jenis pengangguran, seperti pengangguran friksional, struktural, dan siklis. Pengangguran friksional merupakan hasil dari proses pencarian kerja yang memakan waktu karena perbedaan informasi atau preferensi individu terhadap pekerjaan tertentu. Sebaliknya, pengangguran struktural terjadi akibat ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar yang sering disebabkan oleh perubahan teknologi atau pergeseran sektor ekonomi. Pengangguran siklis, menurut Keynes (1936), merupakan akibat dari fluktuasi permintaan agregat dalam siklus bisnis; saat ekonomi mengalami resesi, perusahaan mengurangi produksi dan tenaga kerja, yang menyebabkan pengangguran meningkat.

Ahli lain seperti Blanchard dan Johnson (2017) menambahkan bahwa pengangguran juga dapat disebabkan oleh rigiditas pasar tenaga kerja, seperti regulasi upah minimum yang tinggi atau hambatan dalam proses perekrutan dan pemutusan hubungan kerja. Dengan demikian, pengangguran tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal dalam pasar tenaga kerja tetapi juga oleh kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi makro. Dalam menghadapi pengangguran, pemerintah sering menggunakan berbagai kebijakan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Kebijakan pendidikan dan pelatihan vokasional untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja adalah salah satu langkah yang sering diambil. Becker (1993) dalam teorinya tentang *Human Capital* menekankan pentingnya investasi pada pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang pada akhirnya dapat mengurangi pengangguran. Selain itu, Keynes (1936) mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah untuk proyek

infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja langsung dan memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang merangsang permintaan agregat.

Kebijakan fiskal juga memainkan peran penting dalam mengurangi pengangguran. Sebagaimana dijelaskan oleh Todaro dan Smith (2020), pemerintah dapat menggunakan belanja publik atau insentif pajak untuk mendorong investasi dan konsumsi. Di sisi lain, kebijakan moneter, seperti penurunan suku bunga, dapat meningkatkan akses kredit bagi sektor bisnis, sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja. Namun, Blanchard dan Fischer (1989) mengingatkan bahwa kebijakan makroekonomi tersebut harus dirancang dengan hati-hati untuk menghindari efek samping, seperti inflasi atau ketidakseimbangan fiskal. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengangguran dipandang tidak hanya sebagai masalah ekonomi tetapi juga sebagai tantangan moral dan sosial. Chapra (2008) menjelaskan bahwa Islam menempatkan kerja sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial.

Oleh karena itu, pengangguran dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi tujuan utama dalam ekonomi Islam. Untuk mengatasi pengangguran, instrumen seperti zakat, wakaf, dan qardhul hasan dapat digunakan sebagai solusi. Menurut Hasan (2011), dana zakat dapat dialokasikan untuk pelatihan kerja, pemberdayaan ekonomi, atau penyediaan modal usaha bagi kelompok yang menganggur. Wakaf produktif, sebagaimana dijelaskan oleh Kahf (2003), dapat digunakan untuk membangun infrastruktur ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, atau usaha komersial. Ekonomi Islam juga mendorong distribusi kekayaan yang merata melalui larangan terhadap riba dan preferensi terhadap sistem bagi hasil.

Siddiqi (2006) menekankan bahwa prinsip ini bertujuan untuk mendorong inklusi keuangan dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Selain itu, Islam mendorong kerja sama antara sektor publik dan swasta untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan. Dengan menggabungkan pendekatan teoritis dari para ahli ekonomi konvensional dan pandangan ekonomi Islam, kebijakan yang lebih holistik dapat dirumuskan untuk mengatasi pengangguran. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, seperti pertumbuhan dan efisiensi pasar, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial dan moral yang lebih luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi hubungan antara pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah dalam perspektif ekonomi Islam. Pendekatan deskriptif-analitis memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara mendalam fenomena yang terjadi, serta menganalisis kebijakan yang telah dan sedang diterapkan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pakar ekonomi Islam, akademisi, dan praktisi kebijakan publik. Selain itu, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dari sumber-sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, laporan resmi dari pemerintah, serta teori-teori ekonomi yang relevan. Teknik pengumpulan data utama yang digunakan adalah studi pustaka, wawancara mendalam, dan dokumentasi statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan pendekatan induktif, di mana peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola yang

ditemukan dari data yang ada, melalui tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Dalam hal ini, ekonomi Islam digunakan sebagai kerangka teori untuk menilai kebijakan pengangguran dan inflasi yang diterapkan pemerintah, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan distributif, zakat, wakaf, dan larangan riba. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pengangguran dan inflasi, serta menunjukkan bagaimana kebijakan tersebut dapat sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari Sistem Ekonomi Islam adalah untuk mengembangkan sistem ekonomi yang lebih efektif daripada sistem ekonomi kapitalis, yang dipandang gagal. Sistem ekonomi Islam diharapkan dapat menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan, dan keberlanjutan dalam kehidupan ekonomi (falah). Pada dasarnya Islam tidak mengenal istilah Inflasi hal ini dikarenakan Dinar dan dirham, yang stabil dan didukung oleh Islam, adalah mata uang yang digunakan. Dinar dan dirham adalah mata uang yang tepat karena sejumlah alasan. beberapa diantaranya adalah (Nurul Huda, 2008):

1. Hukum Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum yang telah ditetapkan dan tidak dapat diubah; oleh karena itu, ketika hukum Islam menetapkan diyat (denda), emas digunakan sebagai ukuran.
2. Hanya emas dan perak yang menjadi standar uang ketika Nabi menetapkannya.
3. Zakat diperintahkan oleh Allah Ta'ala dengan nishab emas dan perak.
4. Hanya emas dan perak yang digunakan untuk transaksi uang dan transaksi lain yang hanya dinyatakan dalam mata uang ini, serta untuk penilaian pertukaran mata uang.

Meskipun sangat tidak biasa, penurunan nilai dinar atau dirham masih dapat terjadi jika harga emas, yang menopang nilai nominal dirham, turun. Hal ini dapat terjadi bahkan jika emas dalam jumlah yang sangat besar telah ditemukan. Hanya ada satu contoh keadaan defisit selama masa hidup Nabi, dan itu terjadi sebelum perang Hunain. Namun, salah satu murid Ibnu Khaldun, ekonom Islam Taqiuddin Ahmad ibn Al-Maqrizi, memisahkan inflasi menjadi dua kategori: inflasi alamiah dan inflasi akibat kesalahan manusia. (Riza Ronaldo, 2019).

1) *Natural Inflation*

Inflasi seperti ini, seperti namanya, disebabkan oleh sejumlah penyebab alamiah yang tidak dapat dihindari. Al-Maqrizi mengklaim bahwa banyak makanan dan hasil bumi lainnya mengalami penurunan tajam dan kekurangan setelah terjadi bencana alam. Di sisi lain, permintaan untuk produk-produk ini meningkat karena pentingnya produk tersebut dalam kehidupan. Harga-harga naik jauh di atas kemampuan masyarakat untuk bertahan hidup.

2) *Human Error Inflation*

Kesalahan manusia juga berkontribusi pada inflasi selain penyebab alamiah. Hal ini disebut sebagai False Inflation atau inflasi karena kesalahan manusia. Hal ini juga dapat ditemukan dalam ayat 41 Surat Ar-Rum di Al-Qur'an:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah tampaklah kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”

Penyebab inflasi dapat dibagi menjadi beberapa kategori, seperti pajak yang tinggi, manajemen yang buruk, korupsi, dan pencetakan uang yang ditujukan untuk meraup keuntungan yang tidak proporsional.(Adiwarman A. Karim, 2007).

a. Korupsi dan Administrasi yang Buruk

Menurut Al-Maqrizi, penunjukan pejabat pemerintah berdasarkan penyuapan dan bukan bakat akan menghasilkan nominasi individu yang tidak dapat diandalkan untuk menduduki jabatan-jabatan bergengsi dan penting di lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebagai pejabat, mereka siap untuk menggadaikan semua harta benda mereka sebagai pembayaran. Dengan demikian, para wakil rakyat tidak lagi kebal terhadap campur tangan dan manipulasi para favorit kerajaan.

Selain bisa ditangkap kapan saja, uang mereka juga bisa disita atau mungkin dihukum mati. Dengan demikian, moral dan efektivitas pemerintahan militer dan sipil sangat terpengaruh. Setelah berkuasa, para pejabat ini mulai menyalahgunakan posisi mereka untuk menguntungkan diri mereka sendiri, baik untuk membayar hutang maupun untuk menikmati kenyamanan hidup. Mereka menggunakan setiap sumber daya yang mereka miliki untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak mungkin.

Orang-orang terpaksa meninggalkan rumah dan pekerjaan mereka karena ketidakadilan yang meluas dari para pejabat, yang membuat situasi mereka jauh lebih buruk. Populasi, tenaga kerja, dan hasil produksi semuanya menurun drastis, yang memengaruhi pendapatan negara dan penerimaan pajak.

b. Pajak yang berlebihan

Al-Maqrizi mengklaim bahwa pengeluaran publik telah meroket sebagai akibat dari para pejabat korup yang mengendalikan pemerintahan. Mereka memberlakukan sistem perpajakan yang menindas rakyat dengan menaikkan jumlah pajak yang ada dan memberlakukan sejumlah pajak baru untuk menutupinya. Segmen utama dalam masyarakat, yaitu para petani, terkena dampak yang signifikan dari hal ini.

Agar tetap dapat bertahan, para pemilik tanah akan menaikkan sewa tanah dan mengalihkan beban pajak kepada para petani. Pengembalian pajak yang menjanjikan menarik pihak berwenang dan pemilik tanah, yang meningkatkan dan meningkatkan tekanan mereka terhadap petani. Berbagai pungutan untuk pemeliharaan bendungan dan proyek-proyek terkait menjadi lebih sering dilakukan. Akibatnya, biaya pengolahan tanah, penanaman benih, panen, dan sebagainya menjadi lebih mahal. Dengan kata lain, biaya yang lebih tinggi yang dibutuhkan untuk memproduksi tanaman padi dalam situasi seperti ini berada di luar kemampuan para petani.

Karena sebagian besar benih padi dikuasai oleh para pejabat yang haus akan uang, maka hampir sulit untuk menurunkan kenaikan harga ini, terutama untuk benih padi. Para petani kemudian kehilangan minat untuk bekerja dan memproduksi. Daripada terus hidup dalam kesengsaraan dan menjadi pengembara di daerah-daerah terpencil, mereka lebih suka meninggalkan rumah dan pekerjaan mereka. Akibatnya, terjadi pengurangan tenaga kerja

dan peningkatan lahan yang tidak terpakai, yang berdampak signifikan terhadap tingkat produksi beras dan tanaman pangan lainnya dan pada akhirnya mengakibatkan kelangkaan pangan dan kenaikan harga.

c. Peningkatan sirkulasi Mata Uang *Fulus*

Fulus pertama kali dicetak sebagai alat tukar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, meskipun nilai instrumentalnya jauh lebih rendah daripada nilai nominalnya. Akibatnya, hanya ada sedikit sekali uang ini yang digunakan. Pemerintah mencetak banyak uang fulus ketika terjadi defisit anggaran yang disebabkan oleh penggunaan dana publik secara tidak etis oleh para pejabat untuk berbagai tujuan pribadi dan kolektif.

Al-Maqrizi mengklaim bahwa perusahaan-perusahaan semacam ini berkembang biak ketika keinginan pemerintah untuk menghasilkan uang dengan biaya produksi yang rendah dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar tidak terkendali. Mereka memaksakan penggunaan mata uang ini melalui dekrit yang mereka keluarkan sebagai penguasa. Kepemilikan fulus oleh masyarakat meningkat, dan peredarannya juga meningkat secara signifikan, menjadikan fulus sebagai mata uang utama.

Penyebab Terjadinya Inflasi dan Pengangguran

1. *Penyebab terjadinya inflasi*

Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan inflasi (Bank Indonesia, 2020) yaitu:

- a. Tekanan dari sisi penawaran, yang sering dikenal sebagai *cost push inflation*, adalah hasil dari kenaikan biaya produksi atau tekanan dari sisi penawaran. Di antara elemen-elemen yang berkontribusi adalah:
 - 1) Depresiasi nilai tukar: Ketika mata uang suatu negara melemah terhadap mata uang lain, harga impor meningkat, menaikkan biaya produksi, dan pada akhirnya mendorong inflasi.
 - 2) Pengaruh inflasi luar negeri: Harga impor dapat dipengaruhi oleh inflasi di negara mitra dagang atau di pasar dunia, yang dapat meningkatkan biaya produksi dalam negeri.
 - 3) Kenaikan harga barang yang berada di bawah kendali pemerintah: Jika pemerintah menetapkan batas harga pada barang utama, kenaikan harga dapat meningkatkan biaya produksi secara keseluruhan.
 - 4) Guncangan pasokan negatif: Bencana alam atau gangguan dalam aliran produk dan layanan dapat mengakibatkan penurunan pasokan, yang dapat meningkatkan permintaan harga
- b. Inflasi tarikan permintaan adalah hasil dari meningkatnya permintaan barang dan jasa dibandingkan dengan penawarannya, atau tekanan dari sisi permintaan. Secara makroekonomi, kondisi ini ditandai dengan output riil yang melebihi output potensial atau permintaan agregat yang melebihi kapasitas ekonomi, yang keduanya memiliki kemampuan untuk menaikkan harga.
- c. Ekspektasi Inflasi: Variabel ini dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat umum dan pelaku ekonomi melihat dan mengantisipasi tingkat inflasi di masa depan. Investor, konsumen, dan pelaku ekonomi lainnya dapat dipengaruhi oleh aspek ini.

Terdapat dua kategori ekspektasi inflasi:

- 1) Ekspektasi inflasi adaptif: Ini adalah proyeksi inflasi yang berasal dari data sebelumnya atau pengalaman sebelumnya.

- 2) Ekspektasi inflasi yang didasarkan pada studi dan proyeksi variabel-variabel ekonomi dan kebijakan yang berdampak pada inflasi di masa depan, yang dikenal sebagai ekspektasi inflasi ke depan.

2. Penyebab terjadinya pengangguran

Menjadi pengangguran bukanlah hal yang di inginkan oleh seseorang, namun kadang keadaan yang membuat dan memaksa seseorang menjadi pengangguran. Menurut data yang diambil dari laman Badan Pusat Statistika di Indonesia Menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), terdapat 149,38 juta orang dalam angkatan kerja pada Februari 2024, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah 4,82 persen, yang lebih rendah 0,63 poin persentase dibandingkan Februari 2023.

Terdapat beberapa hal yang menjadi alasan pengangguran (Naf'an, 2014), khususnya:

- a) Hanya ada sedikit prospek pekerjaan meskipun jumlah penduduknya besar. Tidak semua anggota angkatan kerja tertampung di tempat kerja ketika jumlah penduduk yang besar tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan.
- b) Pelatihan dan keahlian yang tidak memadai
Entitas perusahaan tidak membutuhkan tingkat pendidikan dan keahlian yang rendah karena tidak akan meningkatkan produktivitas kerja dan hasil output.
- c) Teknologi mutakhir yang melampaui kemampuan manusia. Penggunaan teknologi meningkat seiring dengan tingkat perkembangan jaman, namun sering kali kemajuan teknologi tidak diikuti dengan peningkatan kemampuan manusia untuk menjadi mahir dalam teknologi tersebut, sehingga mereka yang tidak mampu mempelajari teknologi tersebut tidak dapat diterima bekerja.
- d) Perusahaan yang terus-menerus berusaha meningkatkan keuntungan dengan memperkenalkan langkah-langkah pemotongan biaya seperti rasionalisasi, yang memaksa karyawan untuk bekerja pada tingkat tertinggi untuk memenuhi tujuan. Tenaga kerja tidak lagi dibutuhkan jika tidak mencapai tujuan.
- e) Musim memiliki dampak terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan. Musim dapat memengaruhi sejumlah lapangan pekerjaan, termasuk di sektor perkebunan dan pertanian, yang dapat menyebabkan pengangguran. Banyak pekerja yang menunggu hasil setelah masa tanam selesai. Banyak orang yang menganggur saat menunggu hasil panen, dan mereka akan kembali bekerja saat musim panen tiba.

Dampak dari Inflasi bagi perekonomian

Ekonomi Islam berpandangan bahwa inflasi memiliki efek merugikan pada perekonomian karena sejumlah alasan. (Fadilla, 2017):

1. Mengganggu cara kerja uang, khususnya cara kerja tabungan, pembayaran di muka, dan unit hitung. Orang-orang terpaksa melepaskan aset keuangan dan uang mereka karena inflasi. Inflasi ulang, atau inflasi yang memberi makan diri sendiri, adalah efek lain dari inflasi.
2. Menurunkan minat masyarakat untuk menabung
3. Membuat orang lebih cenderung membeli, khususnya untuk barang-barang mewah dan non-utama.

4. Menggantikan investasi yang menguntungkan dalam industri, perdagangan, transportasi, dan pertanian demi investasi yang tidak produktif seperti perolehan tanah, bangunan, logam mulia, dan uang asing.

Dampak dari Pengangguran bagi perekonomian

Stabilitas politik dan aktivitas ekonomi dipengaruhi secara negatif oleh pengangguran dengan cara berikut: (Naf'an. 2014):

1. Orang yang menganggur mungkin merasa sulit untuk mencapai tingkat kemakmuran setinggi-tingginya. Hal ini terjadi karena pengangguran dapat mengakibatkan pendapatan nasional aktual masyarakat menjadi lebih rendah dari potensi pendapatannya, atau pendapatan yang seharusnya.
2. Pendapatan negara dari sektor pajak, khususnya pajak penghasilan, menurun akibat pengangguran. Hal ini terjadi akibat menurunnya aktivitas ekonomi yang disebabkan oleh pengangguran yang berlebihan, yang menurunkan pendapatan masyarakat.
3. Pertumbuhan ekonomi tidak didorong oleh pengangguran. Daya beli masyarakat menurun sementara pengangguran terus berlanjut, yang menurunkan permintaan terhadap produk manufaktur.
4. Beban belanja publik meningkat karena pengangguran. Bagaimanapun, setiap orang membutuhkan makanan dan kebutuhan pokok lainnya untuk bertahan hidup.
5. Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan politik.
6. Gaji rendah. Baik sisi penawaran maupun permintaan terdampak oleh hal ini.
7. Pembentukan modal dan investasi rendah
8. Bagaimana pengangguran berdampak pada masyarakat dan bagaimana pembangunan nasional dilaksanakan.

Kebijakan mengatasi Inflasi dalam Islam

Bagaimana kebijakan pengendalian inflasi dalam Islam? Untuk mengatasi inflasi harus dijelaskan terlebih dahulu sumber penyebab terjadinya inflasi, sehingga pengendalian inflasi akan berjalan secara efektif. Inflasi alami (natural inflation) terjadi karena perkembangan yang terjadi di pasar di mana ada kenaikan pada sisi permintaan agregate (AD) dan/atau penurunan penawaran agregate (AS).

Inflasi yang timbul karena kenaikan AD misalnya kenaikan pendapatan masyarakat mendorong Kenaikan harga sebagai akibat dari meningkatnya permintaan terhadap suatu barang (inflasi). Inflasi jenis ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khatab. di mana pendapatan penduduk Makkah pada saat ini naik sebagai hasil dari perdagangan mereka dengan luar negeri yang kemudian mendorong peningkatan permintaan barang yang mengakibatkan kenaikan harga (inflasi). Bagaimana mengatasi inflasi dengan corak seperti ini? Kebijakan yang dilakukan khalifah Umar ibn Khatab yaitu dengan melakukan kebijakan dan peringatan kepada masyarakat untuk mengurangi belanja dan permintaan barang, sehingga kemudian harga kembali normal (Imamuddin Yuliadi, 2019).

Inflasi juga bisa terjadi karena adanya gangguan dari sisi suplai barang yang disebabkan karena panen gagal, gangguan cuaca, konflik politik, dan sebagainya. Keadaan ini pernah terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khatab, yaitu ketika terjadi bencana kelaparan. Akibatnya, produksi gandum menurun dan harga gandum naik. Kebijakan yang diambil Umar bin Khatab

adalah menambah pasokan gandum dengan mengimpor gandum dari luar negeri, sehingga jumlah gandum di masyarakat bertambah dan harga gandum kembali normal. Kondisi ini juga sering kali terjadi di masa sekarang misalnya kelangkaan daging sapi, kelangkaan BBM, kelangkaan gula, dan sebagainya yang berakibat kenaikan harga atau menimbulkan inflasi.

Kesalahan manusia, seperti salah urus atau kesalahan administratif, serta perilaku bahaya moral lainnya seperti korupsi, penggelembungan proyek, pajak yang berlebihan, dan seignorage yang berlebihan, juga dapat menyebabkan inflasi dan inefisiensi dalam perekonomian. Biaya ekonomi yang meningkat akibat inefisiensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi (High cost economy), sehingga mengakibatkan produksi semakin sedikit dan harga barang meningkat.

Kebijakan mengatasi Pengangguran dalam Islam

Munculnya pengangguran di tengah Masyarakat menunjukkan adanya masalah pada struktur politik dan sosial. Oleh karena itu, sikap manusia dan struktur sosial harus diperbaiki untuk mengatasi masalah pengangguran. Perlu dikembangkan kesadaran diri tentang harkat dan nilai manusia sebagai makhluk Allah SWT yang sempurna melalui sistem pendidikan yang menyeluruh dan lengkap yang didukung oleh fasilitas yang memadai untuk menjangkau semua lapisan masyarakat. Dibekali dengan pancaindra dan akal pikiran manusia mempunyai tugas dan kewajiban membangun potensi diri dan mengasah kecerdasan guna memanfaatkan karunia Allah Swt. bagi kesejahteraan hidup dan peradaban yang mulia.

Islam menawarkan sejumlah solusi yang harus dipertimbangkan untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan, termasuk yang berikut ini. (Imamuddin Yuliadi, 2019):

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan setiap orang tentang potensi dirinya melalui pendidikan dan pelatihan berkualitas tinggi untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif dan mampu memasuki dunia kerja serta menciptakan lapangan kerja.
2. Memberikan penghargaan yang memadai, seperti pinjaman modal, promosi, fasilitas pemasaran, dan sejenisnya, atas upaya setiap orang yang berkontribusi pada pengembangan potensi ekonomi dan daya saing negara.
3. Menciptakan sebanyak mungkin kemungkinan dan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan potensinya sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan dampak berganda bagi lingkungan sekitarnya.
4. Untuk merangsang minat investor dalam menanamkan modalnya, maka harus dibangun infrastruktur yang memadai, meliputi jaringan jalan, jaringan telekomunikasi, pelabuhan, bandar udara, jaringan energi, dan air minum.
5. Meningkatkan efisiensi ekonomi, menghapus berbagai hambatan perizinan dan regulasi yang dapat mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.
6. Menyingkirkan monopoli dan tindakan mafia ekonomi yang merugikan ekonomi rakyat.
7. Memberikan sanksi tegas kepada lembaga birokrasi yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan tindakan kolusi, nepotisme, dan korupsi yang melanggar hukum.
8. Meningkatkan efektivitas biaya dan kualitas pelayanan publik di sektor birokrasi, kesehatan, pendidikan, dan transportasi.

9. Memanfaatkan sumber daya keuangan negara dengan cara, prosedur, dan aturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam untuk kemaslahatan masyarakat luas.
10. Membina kerja sama internasional untuk mencegah pihak asing menguasai sumber daya alam dan memberikan prospek ekonomi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

PENUTUP

Pada dasarnya Dinar dan dirham, yang nilainya tetap dan didukung oleh Islam, adalah mata uang yang digunakan, sehingga istilah "inflasi" tidak dikenal dalam Islam. Islam mendorong para penganutnya untuk tidak pernah menyerah dan terus bekerja. Islam memandang bekerja sebagai bentuk doa untuk memohon kepada Allah agar diberi rezeki untuk memenuhi kebutuhan pokok seseorang.

Kebijakan pengendalian inflasi harus dijelaskan terlebih dahulu sumber penyebab terjadinya inflasi, sehingga pengendalian inflasi akan berjalan secara efektif. Inflasi alami (natural inflation) terjadi karena perkembangan yang terjadi di pasar di mana ada kenaikan pada sisi permintaan agregate (AD) dan/atau penurunan penawaran agregate (AS). Untuk mengatasi persoalan pengangguran yang perlu diperbaiki adalah peningkatan tatanan sosial dan akal budi manusia. Perlu dikembangkan kesadaran diri tentang harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Allah SWT yang sempurna melalui sistem pendidikan yang menyeluruh dan menyeluruh serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik ketenagakerjaan*. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,82 persen dan rata-rata upah buruh sebesar 3,04 juta rupiah per bulan*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2372/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-82-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-04-juta-rupiah-per-bulan.html>

Bank Indonesia. (2023). *Laporan inflasi Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2020). *Inflasi*. Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/default.aspx>

Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. University of Chicago Press.

Blanchard, O., & Johnson, D. R. (2017). *Macroeconomics* (7th ed.). Pearson.

- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of Maqasid Al-Shari'ah*. Islamic Research and Training Institute.
- Fadilla, L. (2017). Perbandingan teori inflasi dalam perspektif Islam dan konvensional. *Islamic Banking*, 2(2), 1-15.
- Hasan, Z. (2011). *Islamic economics: Principles and applications*. Routledge.
- Huda, N., et al. (2008). *Ekonomi makro Islam: Pendekatan teoritis*. Jakarta: Kencana.
- Kahf, M. (2003). *The role of waqf in improving the ummah welfare*. Islamic Research and Training Institute.
- Karim, A. A. (2007). *Ekonomi makro Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest, and money*. Palgrave Macmillan.
- Mankiw, N. G. (2019). *Principles of economics* (8th ed.). Cengage Learning.
- Naf'an, A. (2014). *Ekonomi makro tinjauan ekonomi syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ronaldo, R. (2019). Pengaruh inflasi dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi makro di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 21(2), 137-153.
- Santoso, A. B. (2017). Analisis inflasi di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Papers Unisbank*.
- Siddiqi, M. N. (2006). *Islamic banking and finance in theory and practice: A survey of state of the art*. *Islamic Economic Studies*, 13(2), 1-48.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson.
- Yuliadi, I. (2019). *Teori ekonomi makro Islam*. Depok: Rajawali Pers.